

Penguatan *Civic Disposition* Siswa Sekolah Menengah Atas melalui Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Nilai Toleransi dan Partisipasi

Theodorus Pangalila ^{1*} , Brain Fransisco Supit ¹ 

¹ Universitas Negeri Manado, Indonesia

* Author Correspondence

Riwayat Artikel :

Diterima : 7 Oktober 2025; Direvisi : 11 Januari 2026; Disetujui : 18 Januari 2026.

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Katolik Karitas Tomohon dengan tujuan untuk memperkuat *civic disposition* siswa sebagai bagian penting dari pendidikan karakter dan pembentukan watak kewarganegaraan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan di kalangan siswa, yang selama ini cenderung dipahami secara konseptual dan belum sepenuhnya terwujud dalam sikap serta perilaku nyata di lingkungan sekolah. Program PkM ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Kegiatan inti meliputi sosialisasi, pelatihan berbasis diskusi kelompok dan *role play*, serta pendampingan penerapan nilai-nilai *civic disposition* dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan perubahan sikap positif siswa, seperti keberanian mengemukakan pendapat, meningkatnya kepedulian terhadap sesama, serta sikap toleransi dalam perbedaan. Guru menilai kegiatan ini efektif dalam melengkapi pembelajaran formal Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian, program PkM ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan pendidikan karakter siswa melalui internalisasi *civic disposition* berbasis sekolah.

Kata kata kunci :

Watak Kewarganegaraan; Pendidikan Karakter; Nilai Kewarganegaraan; Pengabdian Masyarakat; Pendidikan Kewarganegaraan.

Abstract

Strengthening Senior High School Students' Civic Disposition through Training and Mentoring Based on Tolerance and Participation Values. This Community Service Program (PkM) was implemented at Sekolah Menengah Atas Katolik Karitas Tomohon with the aim of strengthening students' civic disposition as an essential component of character education and the formation of civic character. The program was motivated by the limited internalization of civic values among students, which has largely remained at a conceptual level and has not been fully reflected in their attitudes and actual behaviors within the school environment. The PkM was conducted using a participatory approach through the stages of planning, implementation, observation, evaluation, and reflection. The core activities included socialization sessions, training based on group discussions and role-play, as well as mentoring to support the application of civic disposition values in students' daily school life. The results indicate an increase in students' awareness and positive attitudinal changes, such as greater confidence in expressing opinions, enhanced social concern, and more tolerant attitudes toward differences. Teachers perceived the program as effective in complementing formal Civic Education learning. Therefore, this PkM provides a tangible contribution to strengthening students' character education through school-based internalization of civic disposition.

Keywords:

Civic Disposition; Character Education; Civic Values; Civic Education; Community Service Program.

Contact : Corresponding author  e-mail: theopangalila@unima.ac.id



How to Cite: Pangalila, T., & Supit, B. F. Penguatan Civic Disposition Siswa Sekolah Menengah Atas melalui Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Nilai Toleransi dan Partisipasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 64-71. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v6i1.3697>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, terutama dalam konteks pembangunan karakter generasi muda (Riyanti, 2020). Arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan sosial-budaya yang berlangsung cepat telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat, termasuk peserta didik di lingkungan sekolah (Hidayah & Sujastika, 2024). Berbagai fenomena seperti meningkatnya intoleransi, ujaran kebencian, rendahnya kepedulian sosial, melemahnya sikap tanggung jawab, hingga konflik horizontal di kalangan pelajar menjadi indikator terjadinya krisis karakter dan dekarakterisasi (Pratiwi, 2023; Halawati, 2020). Kondisi ini, jika tidak ditangani secara serius, berpotensi melemahkan kohesi sosial dan mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Khatimah et al., 2022; Kurniawati et al., 2022).

Desain Induk Pengembangan Karakter Bangsa menegaskan bahwa persoalan karakter bangsa berakar pada rendahnya kualitas internalisasi nilai-nilai Pancasila, memudarnya etika publik, melemahnya kesadaran hidup dalam keberagaman, serta rendahnya komitmen kebangsaan (Pangalila, 2017; Mazid et al., 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan karakter tidak cukup hanya melalui penanaman pengetahuan normatif, tetapi memerlukan proses pembiasaan dan pengalaman nyata yang mampu membentuk sikap dan perilaku kewarganegaraan peserta didik secara berkelanjutan (Sofha et al., 2023; Dewi & Ulfiah, 2021).

Dalam sistem pendidikan nasional, sekolah memiliki peran strategis sebagai wahana utama pembentukan karakter dan watak kewarganegaraan (Hariyanto, 2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, serta kemampuan hidup bersama secara demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk warga negara yang berkarakter dan berkepribadian Indonesia (Zulfikar & Dewi, 2021; Nurizka & Rahim, 2020).

Secara keilmuan, PKn dipahami sebagai sarana *nation and character building* yang mengintegrasikan pendidikan berbasis nilai (*value-based education*) dalam proses pembelajaran (Yuniarto & Yudha, 2021; Sakban & Sundawa, 2023). Winataputra dan Budimansyah (2007) menegaskan bahwa PKn tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik, sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui konsep kewarganegaraan, tetapi juga mampu dan terbiasa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Branson (1998) membagi kompetensi kewarganegaraan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Di antara ketiga dimensi tersebut, *civic disposition* memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan watak, nilai moral, dan kebiasaan warga negara dalam kehidupan publik maupun privat.

Civic disposition mencerminkan sikap dan karakter kewarganegaraan seperti toleransi, tanggung jawab, kepedulian sosial, partisipasi, kedisiplinan, serta penghargaan terhadap keberagaman (Maesaroh et al., 2023; Rosyid et al., 2020). Nilai-nilai ini menjadi fondasi etis yang menopang kehidupan demokratis dan keberlanjutan masyarakat multikultural (Syahwaliana et

al., 2025). Tanpa *civic disposition* yang kuat, pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan berisiko tidak terwujud dalam perilaku nyata (Novitasari et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan *civic disposition* di kalangan peserta didik, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, menjadi kebutuhan yang mendesak.

Hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak SMA Katolik Karitas Tomohon menunjukkan bahwa penguatan *civic disposition* siswa belum berjalan secara optimal. Pemahaman siswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan masih cenderung bersifat konseptual dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Beberapa siswa masih menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap sesama, kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan bersama, serta belum konsisten dalam menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang sosial. Selain itu, guru menghadapi keterbatasan waktu dan strategi pembelajaran untuk secara khusus melatih dan membiasakan sikap kewarganegaraan dalam konteks nyata kehidupan sekolah.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan berbagai lembaga dan penelitian yang menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk pelajar, rentan terhadap pengaruh intoleransi, radikalisme, dan eksklusivisme. Pangalila dan Supit (2024) serta Adjie et al. (2025) menegaskan bahwa lingkungan pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius sebagai ruang strategis dalam mencegah masuknya paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi nyata yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan.

Urgensi penguatan *civic disposition* juga sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya melalui penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pendidikan dan Permendikbudristek Nomor 56/M/2022. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek yang mendorong peserta didik untuk mengaitkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial dengan praktik kehidupan nyata.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMA Katolik Karitas Tomohon sebagai bentuk kontribusi akademik dalam menjawab permasalahan mitra. Program ini dirancang dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk memperkuat *civic disposition* siswa, khususnya pada aspek toleransi, tanggung jawab, partisipasi, dan kepedulian sosial. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis praktik, kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga memberdayakan guru dan sekolah dalam menumbuhkan budaya kewarganegaraan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Metode

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan secara aktif pihak mitra, yaitu pimpinan sekolah, guru, dan siswa SMA Katolik Karitas Tomohon. Pendekatan ini dipilih agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap kegiatan penguatan *civic disposition*. Tahap awal kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak sekolah dan asesmen awal untuk memetakan tingkat pemahaman siswa terkait *civic disposition*. Selanjutnya, pelaksanaan PKM dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang berlangsung selama satu bulan. Metode yang digunakan merupakan kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok,

simulasi atau *role play*, serta praktik lapangan berbasis proyek sederhana di lingkungan sekolah. Ceramah interaktif digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai *civic disposition*, sementara diskusi dan simulasi diarahkan untuk melatih sikap toleransi, partisipasi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam konteks nyata kehidupan siswa. Praktik lapangan bertujuan membiasakan siswa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Evaluasi kegiatan dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi, refleksi bersama guru dan siswa, serta pengukuran ulang pemahaman siswa menggunakan instrumen yang sama dengan asesmen awal. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar tindak lanjut, baik dalam bentuk pendampingan lanjutan maupun integrasi penguatan *civic disposition* ke dalam aktivitas pembelajaran dan budaya sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Tahap awal PKM ini adalah perencanaan. Tahap perencanaan menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan PKM di SMA Katolik Karitas Tomohon. Pada tahap ini, tim pelaksana dan pihak sekolah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu koordinasi untuk pembahasan program kegiatan, penyusunan draft instrumen dan identifikasi masalah, serta penyusunan program edukasi.

Pertama, Pembahasan Program Kegiatan. Rapat internal tim dilaksanakan untuk membagi tugas dan menyusun agenda kerja secara rinci. Selanjutnya, koordinasi dilakukan dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan para guru. Dalam pertemuan ini, tim memaparkan maksud serta tujuan program, yaitu menguatkan pemahaman dan praktik *civic disposition* siswa. Pihak sekolah menyatakan dukungan penuh, karena program ini sejalan dengan kebutuhan pengembangan karakter siswa di tengah tantangan intoleransi dan melemahnya sikap partisipatif di kalangan generasi muda.



Gambar 1. Koordinasi dengan pihak sekolah

Kedua, Penyusunan Draft Instrumen dan Identifikasi Masalah. Tim menyusun instrumen berupa panduan pertanyaan dan bahan observasi untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi siswa terkait *civic disposition*. Dari diskusi awal bersama guru, ditemukan bahwa banyak siswa memahami nilai kewarganegaraan hanya sebatas pengetahuan kognitif, belum menyentuh aspek sikap dan perilaku nyata. Faktor lain yang muncul adalah kurangnya integrasi pembelajaran kewarganegaraan dengan praktik kehidupan sekolah sehari-hari.

Ketiga, Penyusunan Program Edukasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun program edukasi berupa modul sosialisasi *civic disposition*. Modul ini memuat konsep dasar *civic disposition*, dimensi yang terkandung di dalamnya (kepedulian, tanggung jawab, toleransi, partisipasi,

serta penghargaan pada keberagaman), dan strategi aplikatif untuk mengimplementasikannya. Modul ini dipersiapkan tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk menjadi pegangan guru dalam pembelajaran lanjutan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan PkM di SMA Katolik Karitas Tomohon berlangsung melalui tiga kegiatan utama, yaitu sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Pada tahap sosialisasi, siswa dikumpulkan untuk menerima penjelasan mengenai pentingnya *civic disposition* sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan. Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif, disertai sesi tanya jawab. Respon siswa menunjukkan bahwa mereka mulai memahami kaitan antara sikap sehari-hari dengan tanggung jawab sebagai warga sekolah dan masyarakat. Kegiatan pelatihan kemudian dilaksanakan melalui diskusi kelompok dan simulasi peran (*role play*). Siswa dilibatkan dalam berbagai situasi praktis, seperti cara menyikapi perbedaan pendapat di kelas atau mengambil keputusan bersama untuk kepentingan kelompok. Kegiatan ini menekankan bahwa *civic disposition* tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan *civic knowledge* dan *civic skill* sebagaimana dikemukakan oleh Branson (1998). *Civic knowledge* memberi dasar pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, *civic skill* melatih kecakapan intelektual dan partisipatoris, sementara *civic disposition* menginternalisasi nilai-nilai moral dan karakter publik yang penting bagi kehidupan demokratis.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM: Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan

Selanjutnya, kegiatan pendampingan dilakukan bersama guru untuk memastikan implementasi nilai-nilai *civic disposition* dalam keseharian siswa di sekolah. Tim PkM bersama guru memantau praktik nyata, seperti kerja sama dalam kegiatan ekstrakurikuler, kepatuhan terhadap tata tertib, hingga sikap peduli terhadap teman sebaya. Pendampingan ini sejalan dengan gagasan Lickona dalam Pangalila (2017) mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk warga negara yang cerdas sekaligus baik (*smart and good citizen*). Dengan cara ini, *civic disposition* diharapkan tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga terwujud dalam perilaku nyata siswa di lingkungan sekolah.

Tahap ketiga adalah Observasi dan Evaluasi. Observasi dilakukan oleh tim PkM selama proses sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Beberapa temuan penting adalah meningkatnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, tumbuhnya kesadaran untuk bekerja sama, serta adanya perubahan sikap dalam menghargai perbedaan. Meski tidak semua siswa menunjukkan perubahan yang sama cepat, namun mayoritas tampak lebih terbuka dan berani terlibat aktif dalam diskusi kelompok.

Evaluasi terhadap kegiatan menunjukkan bahwa metode yang digunakan (ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan pendampingan) cukup efektif untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai *civic disposition*. Guru menilai bahwa siswa mulai menampilkan sikap lebih bertanggung jawab terhadap tugas kelas, lebih peduli terhadap teman yang kesulitan, serta lebih menghargai keberagaman pendapat. Kendati demikian, evaluasi juga menemukan kendala berupa keterbatasan waktu dan masih adanya sebagian siswa yang cenderung pasif. Hal ini menjadi catatan bahwa penguatan *civic disposition* memerlukan kesinambungan dan pengulangan agar benar-benar terinternalisasi.



Gambar 3. Observasi dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah Refleksi dan Tindak Lanjut. Refleksi dilakukan bersama siswa dan guru pada akhir kegiatan. Siswa menyatakan bahwa kegiatan ini membuka wawasan mereka tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai warga negara yang baik, tidak hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat. Guru menilai bahwa program PKM ini mampu melengkapi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas, yang selama ini lebih menekankan aspek pengetahuan daripada sikap.



Gambar 4. Kegiatan penutup setelah melakukan refleksi bersama guru dan siswa

Kegiatan PKM ini secara keseluruhan memberikan dampak positif, meskipun masih ada kekurangan terutama dari segi keterbatasan waktu dan ruang praktik. Namun demikian, keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman siswa terkait *civic disposition* menjadi langkah awal yang penting untuk membangun generasi yang toleran, demokratis, dan partisipatif. Dengan tindak lanjut yang konsisten dari pihak sekolah, *civic disposition* dapat terus diperkuat sebagai bagian integral dari pendidikan karakter siswa.

Simpulan

Kegiatan PKM di SMA Katolik Karitas Tomohon menunjukkan bahwa program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilaksanakan secara partisipatif mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat *civic disposition* siswa. Pelaksanaan kegiatan mendorong peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya sikap toleransi, tanggung jawab, partisipasi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Hasil observasi dan evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif pada sikap siswa, seperti meningkatnya

keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan bekerja sama, serta penghargaan terhadap perbedaan. Metode ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan praktik lapangan terbukti efektif sebagai sarana internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang bersifat aplikatif. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini melengkapi pembelajaran formal Pendidikan Kewarganegaraan di kelas dan menjadi langkah strategis dalam membangun karakter siswa SMA yang demokratis, toleran, dan partisipatif melalui intervensi pengabdian berbasis sekolah.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Negeri Manado atas dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan PKM tahun 2025 ini.

References

- Adjie, Z., Djaafar, L., & Kartoredjo, V. (2025). Penguatan nasionalisme sebagai pencegahan radikalisme di lingkungan SMK Negeri 1 Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(3). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1620>
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education: A forthcoming education policy task force*. Center for Civic Education.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn dan masyarakat multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dewi, D. A., & Ulfiah, Z. (2021). Peranan pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 499–506. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34152>
- Halawati, F. (2020). Pengaruh pendidikan karakter terhadap perilaku siswa. *Education and Human Development Journal*, 5(2), 51–60. <https://doi.org/10.33086/ehdj.v5i2.1561>
- Hariyanto, H. (2021). Peranan pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan karakter bangsa. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 95–100. <https://doi.org/10.51878/learning.viii.205>
- Hidayah, Y., & Sujastika, I. (2024). Strengthening civic disposition to build civic engagement and political participation in civic education in Indonesia. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 5(2), 233–240. <https://doi.org/10.21154/asanka.v5i2.9867>
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh implementasi pendidikan karakter terhadap sikap sosial pada siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127–132. <https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/1266>
- Kurniawaty, I., Purwati, P., & Faiz, A. (2022). Penguatan pendidikan karakter cinta tanah air. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 496–498. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3905>
- Maesaroh, S., Masyitoh, I. S., & Fauzi, A. (2023). Developing civic disposition for Indonesian students through civic education in international schools. In *Proceedings of the 4th Annual Civic Education Conference (ACEC 2022)* (pp. 924–932). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_97
- Mazid, S., Wulansari, A., & Hasanah, I. (2025). Integrating civic spirituality and civic disposition to build ethical citizen character. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 93–100. <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/83212>
- Novitasari, N., Syahroni, M., Mazid, S., Izzati, F. A., & Wulanjani, A. N. (2025). Civics education learning based on local cultural values to strengthen students' civic disposition. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 10(3), 171–179. <https://doi.org/10.25217/ji.v10i3.6672>

- Nurizka, R., & Rahim, A. (2020). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter siswa melalui budaya sekolah. *Elementary School*, 7(1), 38–49. <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v7i1.478>
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 91–103. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v7i1.3553>
- Pangalila, T., & Fatimah, S. (2023). The influence of civic education learning and the Pancasila student profile program on improving ideological values understanding. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 359–369. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.61511>
- Pangalila, T., & Supit, B. F. (2024). Penguatan profil pelajar Pancasila pada siswa di SMP Negeri 4 Tomohon. *Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 74–82. <https://doi.org/10.61476/ehowbg56>
- Pratiwi, D. (2023). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa sekolah dasar. *Proceedings Series of Educational Studies*, 178–184. <https://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/view/8141>
- Riyanti, D. (2020). An analysis of the suitability of students' civic knowledge and disposition in the topic of citizens' rights and obligations. *Research and Evaluation in Education*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.21831/reid.v6i1.31621>
- Rosyid, R., Dewantara, J. A., & Purwaningsih, E. (2020). Pancasila character education in teaching materials to develop college students' civic disposition. In *Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 325–330). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.063>
- Sakban, A., & Sundawa, D. (2023). Character education: Direction and priority for national character development in Indonesia. *Jurnal Kependidikan*, 9(3), 794–807. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i3.7843>
- Syahwaliana, K., Habib, T. A., Shofiyah, S. N. A., & Oki, S. (2025). Integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan civic disposition melalui pendidikan Pancasila: A systematic literature review. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(1), 76–88. <https://doi.org/10.24114/jk.v22i1.64360>
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic education: Konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas*. Prodi PKn SPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yuniarto, B., & Yudha, R. P. (2021). Citizenship education in the character building of the nation. *International Journal of Education and Humanities*, 1(3), 162–170. <https://doi.org/10.58557/ijeh.v1i3.28>
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115. <https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/1171>